

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERBASIS EKOWISATA DI KELURAHAN MAFUTUTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ningsi Amin¹, Ramdhani Salam^{2*}, Syarifudin Adjam³, Afriandi Munir⁴, Hesty Sangadji⁵,

Umiati Fatgehipon⁶, Sitna Hajar Muthalib Putri⁷

^{1,4,5,6,7} Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Khairun

^{2,3} Dosen Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Khairun

*Email: ramdani.salam@unkhair.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Penelitian diarahkan untuk menjawab bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan mangrove yang mulai dimanfaatkan sebagai destinasi ekowisata. Kajian difokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan mangrove. Sumber data berasal dari masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove; namun, dokumen penelitian yang tersedia tidak mencantumkan secara lengkap desain penelitian, jumlah partisipan, teknik penentuan sampel, instrumen, dan prosedur analisis sehingga rincian tersebut tidak diasumsikan dalam abstrak ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam diskusi dan pertukaran gagasan, pemilihan lokasi penanaman, perencanaan fasilitas pendukung, kerja sama dalam pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan kawasan belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dan kerusakan fasilitas pendukung, sedangkan waktu dan ketergantungan teridentifikasi sebagai faktor penghambat partisipasi. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan. Penguatan keterlibatan masyarakat dan pemeliharaan fasilitas diperlukan untuk mendukung pengelolaan ekowisata mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Partisipasi masyarakat; Ekowisata; Hutan mangrove; Pengelolaan mangrove; Pengelolaan berkelanjutan*

ABSTRACT. This study examines community participation in ecotourism-based mangrove forest management in Mafututu Village, East Tidore District, Tidore Islands City. The study seeks to answer how local communities participate in managing mangrove areas that have begun to be utilized as ecotourism destinations. The investigation focuses on community involvement in the stages of planning, organizing, implementation, monitoring, and evaluation of mangrove management. Data sources were drawn from community members involved in the management of the mangrove area; however, the available research document does not provide complete information regarding the research design, number of participants, sampling technique, instruments, and analytical procedures; therefore, these details are not assumed in this abstract. The findings indicate that community members participate in discussions and exchanges of ideas, selection of planting locations, planning of supporting facilities, cooperation in management, implementation of activities, as well as monitoring and evaluation. Management of the area has not yet been optimal due to limited and damaged supporting facilities, while time constraints and dependency were identified as factors hindering community participation. These findings emphasize that community participation is a continuous process encompassing all stages of management. Strengthening community involvement and maintaining supporting facilities are therefore necessary to promote more effective and sustainable mangrove ecotourism management.

Keywords: *Community participation; Ecotourism; Mangrove forest; Mangrove management; Sustainable management*

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang memiliki fungsi strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat (Faizal et al., 2023). Keberadaannya tidak hanya berperan secara ekologis sebagai pelindung pantai, pencegah abrasi dan intrusi air laut, serta habitat berbagai biota, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dalam konteks wilayah kepulauan, keberadaan mangrove menjadi semakin penting karena kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya pesisir (Tolangara et al., 2017). Pemanfaatan mangrove melalui kegiatan wisata merupakan salah satu alternatif yang dapat mengintegrasikan kepentingan konservasi dan peningkatan manfaat ekonomi. Ekowisata memungkinkan kawasan mangrove dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi dan pendidikan lingkungan dengan tetap memberikan dukungan terhadap upaya konservasi serta perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan mangrove sebagai kawasan ekowisata tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut (Rachman et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembangunan melalui kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun materi, termasuk dalam memanfaatkan hasil pembangunan (Hafrida et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan mangrove, partisipasi tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Sementara itu, pengelolaan mangrove

berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor penting dalam memikirkan, merencanakan, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, serta rehabilitasi mangrove (Kurniawansyah et al., 2023). Contoh konkret keterlibatan tersebut dapat berupa partisipasi dalam menentukan lokasi penanaman mangrove, pembangunan fasilitas pendukung wisata, pemeliharaan kawasan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya mangrove.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting dalam pengelolaan mangrove. Dalam satu studi yang mengkaji model partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove di sepanjang pantai Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Studi tersebut memusatkan perhatian pada keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove dan memberikan dasar bahwa masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pemulihan ekosistem mangrove (Amal & Baharuddin, 2016). Demikian pula, penelitian yang mengkaji persepsi masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung terhadap hutang mangrove yang menghubungkan persepsi masyarakat dengan keterlibatannya dalam pengelolaan mangrove serta menegaskan relevansi pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Permata et al., 2021).

Pada konteks yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Atakari tahun 2023 yang mengkaji observasi tentang pengelolaan hutan mangrove untuk di jadikan tempat wisata pesona mangrove Alor kelurahan Mutiara Rt 02, Rw 04 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur telah memperluas perspektif pengelolaan mangrove dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pelestarian

(Atakari et al., 2023). Sementara itu, Restuadi dan Tamani tahun 2023 menelaah persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap ekowisata mangrove di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Studi ini memperlihatkan pentingnya melihat partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan tujuan pelestarian ekosistem (Restuadi & Tamami, 2023). Pada tataran kebijakan, Munawir tahun 2022 mengkaji pengembangan kebijakan pembangunan daerah dalam pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan di Teluk Jakarta, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan wilayah pesisir (Munawir et al., 2022).

Secara sintesis, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove memiliki keterkaitan dengan partisipasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pelestarian, dan kebijakan pembangunan. Keterlibatan langsung masyarakat menjadi penting karena masyarakat lokal dapat berperan dalam merumuskan kebutuhan, merencanakan kegiatan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sumber daya mangrove (Amal & Baharuddin, 2016). Namun, sumber penelitian yang tersedia dalam naskah ini tidak memberikan rincian yang memadai mengenai pertanyaan penelitian, desain, dan temuan empiris setiap penelitian terdahulu. Oleh karena itu, uraian studi terdahulu dibatasi pada informasi yang terdokumentasi dan tidak menambahkan hasil yang tidak tersedia dalam sumber asli.

Konteks Kelurahan Mafututu memperlihatkan persoalan yang lebih spesifik. Kawasan mangrove setempat telah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai kawasan ekowisata. Sejumlah fasilitas telah tersedia, seperti jembatan bambu untuk menyusuri kawasan mangrove, menara bambu untuk menikmati panorama dari ketinggian, serta pondok di

tengah kawasan mangrove dan pesisir. Namun, pengelolaannya belum maksimal, ditandai oleh keterbatasan sarana-prasarana dan adanya fasilitas yang mengalami kerusakan tanpa perbaikan yang memadai. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan kelompok yang berada paling dekat dengan kawasan mangrove dan berpotensi terlibat secara langsung dalam pengelolaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Tujuan ini konsisten dengan rumusan penelitian yang secara khusus menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama kajian.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti kontekstual mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove pada kawasan kepulauan yang mulai dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat dengan menempatkan partisipasi sebagai bagian integral dari pengelolaan mangrove. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi informasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat keterlibatan masyarakat pada pengelolaan kawasan mangrove Mafututu, sehingga pemanfaatannya sebagai kawasan ekowisata dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan ekosistem mangrove yang telah

mulai dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk kegiatan wisata. Pengembangan tersebut ditunjukkan oleh tersedianya fasilitas berupa jembatan bambu untuk menyusuri kawasan mangrove, menara bambu untuk menikmati panorama dari ketinggian, serta pondok di kawasan mangrove dan pesisir. Meskipun demikian, pengelolaan kawasan belum maksimal karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh perbaikan secara memadai. Fokus penelitian diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Mafututu. Partisipasi masyarakat dikaji melalui tahapan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat berkaitan dengan proses diskusi dan pertukaran pemikiran mengenai kegiatan pengelolaan, termasuk penentuan lokasi penanaman dan fasilitas penunjang ekowisata. Pengorganisasian berkaitan dengan kerja sama antara pengelola, masyarakat, dan pihak lainnya, sedangkan pelaksanaan mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Monitoring dan evaluasi diarahkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan. Sumber data penelitian diarahkan pada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove di Kelurahan Mafututu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kawasan Mangrove dan Pengembangan Ekowisata Mafututu

Kawasan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore

Timur, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu sumber daya pesisir yang mulai dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekowisata. Pemanfaatan tersebut melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi kawasan mangrove menjadi objek wisata. Secara empiris, pengembangan ekowisata di kawasan ini ditandai dengan tersedianya beberapa fasilitas yang mendukung aktivitas pengunjung. Fasilitas tersebut meliputi jembatan berbahan bambu yang digunakan sebagai jalur untuk menyusuri kawasan hutan mangrove, menara bambu yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan mangrove dari ketinggian, serta pondok yang berada di tengah kawasan mangrove dan di sekitar pesisir pantai. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kawasan mangrove Mafututu telah mengalami proses pemanfaatan yang tidak hanya berorientasi pada fungsi ekologis, tetapi juga pada fungsi wisata.

Meskipun telah dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove Mafututu belum berlangsung secara maksimal. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata. Beberapa fasilitas yang telah tersedia juga mengalami kerusakan, tetapi belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Selain itu, pengadaan fasilitas baru untuk menunjang pengembangan kawasan mangrove sebagai objek ekowisata masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kawasan mangrove dan kesiapan fasilitas pendukung pengelolaannya. Dalam konteks ini, masyarakat menempati posisi penting karena merupakan pihak yang tinggal paling dekat dengan kawasan mangrove dan diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaannya. Dengan demikian, pengembangan ekowisata mangrove

Mafututu masih memerlukan penguatan pengelolaan dan keterlibatan masyarakat agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

2. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata di Kelurahan Mafututu telah tercermin pada tahap perencanaan. Tahap ini menjadi bagian awal dalam proses pengelolaan karena masyarakat bersama pengelola terlibat dalam pembahasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan mangrove. Bentuk keterlibatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan diskusi dan pertukaran pikiran mengenai kebutuhan pengelolaan kawasan. Dalam proses tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan kawasan mangrove, sehingga perencanaan tidak hanya bertumpu pada pengelola, tetapi turut melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Partisipasi pada tahap perencanaan juga terlihat dalam pemilihan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan penanaman mangrove maupun pembangunan fasilitas penunjang ekowisata. Penentuan lokasi menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan berikutnya. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan lokasi tersebut menunjukkan adanya kontribusi masyarakat sejak tahap awal pengelolaan, terutama melalui penyampaian pemikiran dan keterlibatan dalam proses penentuan kegiatan. Perencanaan dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan hutan mangrove dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan mencakup diskusi,

pertukaran gagasan, pemilihan lokasi penanaman, serta perencanaan fasilitas penunjang ekowisata. Dengan demikian, masyarakat tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga terlibat dalam proses awal penentuan arah kegiatan pengelolaan mangrove.

3. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengorganisasian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pengorganisasian dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu ditandai oleh adanya kerja sama antara pengelola, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan. Pengorganisasian menjadi bagian dari tahapan partisipasi masyarakat setelah proses perencanaan dilakukan. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat diarahkan pada upaya mengoordinasikan sumber daya yang tersedia agar kegiatan pengelolaan mangrove dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pengorganisasian tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan individual masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan kerja sama antarpihak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan mangrove.

Bentuk partisipasi pada tahap pengorganisasian terutama terlihat melalui kerja sama masyarakat dengan pengelola dalam mendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Koordinasi tersebut menjadi penting karena pengelolaan kawasan mangrove melibatkan berbagai sumber daya dan kepentingan yang tidak dapat dilaksanakan secara individual. Keterlibatan masyarakat dalam struktur kerja sama tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan bagian dari proses pengelolaan, bukan sekadar penerima manfaat dari keberadaan kawasan mangrove. Hal ini sejalan dengan kondisi pengelolaan

mangrove Mafututu yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan sebagai ekowisata.

4. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu. Pada tahap ini, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk nyata keikutsertaan dalam pengelolaan kawasan. Pelaksanaan diarahkan pada upaya menjalankan rencana yang telah disusun melalui kerja sama antara masyarakat dan pengelola sehingga tujuan pengelolaan mangrove dapat dicapai. Dengan demikian, partisipasi pada tahap pelaksanaan menunjukkan peralihan dari keterlibatan dalam bentuk pemikiran dan perencanaan menuju tindakan dalam mendukung pengelolaan kawasan mangrove.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan juga berkaitan dengan pemanfaatan kawasan mangrove sebagai ekowisata. Hal ini terlihat dari keberadaan fasilitas yang telah tersedia di kawasan tersebut, seperti jembatan bambu yang digunakan untuk menyusuri hutan mangrove, menara bambu untuk melihat kawasan dari ketinggian, serta pondok di tengah hutan mangrove dan kawasan pesisir. Fasilitas tersebut menunjukkan adanya aktivitas pengembangan kawasan untuk mendukung pemanfaatan mangrove sebagai destinasi wisata. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pengelolaannya belum maksimal karena beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan belum memperoleh perbaikan, sementara penyediaan sarana dan prasarana pendukung masih terbatas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan merupakan bagian penting

dalam mewujudkan rencana pengelolaan mangrove berbasis ekowisata.

5. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Monitoring dan Evaluasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu. Dalam penelitian ini, monitoring diposisikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat pada tahap ini berkaitan dengan proses pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan kawasan mangrove setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dilakukan. Monitoring juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga perkembangan pengelolaan kawasan dapat diamati.

Kebutuhan terhadap monitoring dan evaluasi terlihat pula dari kondisi empiris kawasan mangrove Mafututu. Meskipun kawasan tersebut telah dilengkapi fasilitas penunjang ekowisata berupa jembatan bambu, menara bambu, dan pondok, pengelolaannya belum berlangsung secara maksimal. Beberapa fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan dan belum memperoleh perbaikan, sementara penyediaan sarana dan prasarana tambahan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemantauan pengelolaan kawasan, terutama untuk melihat kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dan kondisi aktual fasilitas pendukung ekowisata.

B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata di Kelurahan Mafututu berlangsung melalui rangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pola tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian dari proses pengelolaan kawasan. Namun, keberadaan fasilitas yang mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengelolaan ekowisata yang optimal. Selain itu, waktu dan ketergantungan muncul sebagai faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove Mafututu terjawab melalui temuan bahwa partisipasi hadir pada beberapa tahapan pengelolaan, tetapi masih menghadapi kendala dalam praktiknya.

Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan memiliki makna penting karena menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi sebelum kegiatan dilaksanakan. Diskusi, pertukaran gagasan, pemilihan lokasi penanaman, dan perencanaan fasilitas pendukung merupakan bentuk partisipasi yang memungkinkan pengetahuan dan kepentingan lokal masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif partisipatif, kondisi ini lebih substantif dibandingkan keterlibatan yang hanya menempatkan masyarakat sebagai tenaga pelaksana (Wardhani et al., 2022). Dengan kerangka tersebut, keterlibatan masyarakat Mafututu pada tahap perencanaan mengindikasikan adanya unsur partisipasi aktif, meskipun data penelitian belum cukup untuk menentukan tingkat otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pada tahap pengorganisasian dan pelaksanaan, kerja sama antara masyarakat, pengelola, dan pihak lain memperlihatkan

dimensi kolektif pengelolaan sumber daya pesisir. Pengelolaan mangrove memang sulit dilakukan secara individual karena mencakup kepentingan ekologis, sosial, dan pemanfaatan kawasan. Temuan ini konsisten dengan kerangka pengelolaan berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pengelolaan sumber daya (Kurniawansyah et al., 2023). Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa keterlibatan langsung masyarakat memungkinkan mereka berpartisipasi dalam memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi kebutuhan pengelolaan mangrove (Amal & Baharuddin, 2016). Dengan demikian, kerja sama yang ditemukan di Mafututu dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menghubungkan sumber daya masyarakat dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Meskipun demikian, terdapat jarak antara keterlibatan masyarakat dan kondisi aktual pengembangan ekowisata. Keberadaan jembatan bambu, menara bambu, dan pondok menunjukkan bahwa mangrove telah diarahkan menuju fungsi wisata. Namun, kerusakan sebagian fasilitas dan keterbatasan sarana-prasarana mengindikasikan bahwa pembangunan fasilitas belum sepenuhnya diikuti mekanisme pemeliharaan yang berkelanjutan. Temuan ini penting karena partisipasi tidak seharusnya berhenti ketika fasilitas telah dibangun. Partisipasi yang berkelanjutan membutuhkan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi. Secara konseptual, hal tersebut sesuai dengan pandangan bahwa pengelolaan sumber daya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut (Pratiwi et al., 2023).

Temuan mengenai monitoring dan evaluasi semakin memperjelas persoalan tersebut. Pengawasan diperlukan untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan perencanaan, sedangkan kondisi fasilitas dapat menjadi indikator empiris perlunya fungsi kontrol yang lebih konsisten.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan berbasis masyarakat dengan menunjukkan bahwa partisipasi perlu dipahami sebagai proses berjenjang, bukan sekadar kehadiran masyarakat dalam kegiatan. Secara praktis, pengelolaan ekowisata mangrove Mafututu membutuhkan kesinambungan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi, khususnya dalam menjaga fungsi dan keberlanjutan fasilitas yang telah dikembangkan. Signifikansi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove tidak cukup ditentukan oleh keberadaan potensi alam dan fasilitas wisata; keberlanjutannya sangat terkait dengan bagaimana masyarakat memperoleh ruang yang konsisten untuk berpartisipasi sepanjang siklus pengelolaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dengan tujuan memahami bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat melalui diskusi, pertukaran gagasan, pemilihan lokasi penanaman, dan perencanaan fasilitas pendukung ekowisata. Pada tahap pengorganisasian dan pelaksanaan, keterlibatan diwujudkan melalui kerja sama antara masyarakat, pengelola, dan pihak terkait dalam

menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam mengawasi kesesuaian pelaksanaan dengan rencana pengelolaan. Meskipun demikian, pengelolaan kawasan belum optimal, terutama karena keterbatasan dan kerusakan fasilitas pendukung, sementara waktu dan ketergantungan teridentifikasi sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan, bukan sekadar keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Secara praktis, pemerintah dan pengelola perlu memperkuat ruang keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan serta meningkatkan pemeliharaan fasilitas ekowisata. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji tingkat dan kualitas partisipasi secara lebih terukur serta mengeksplorasi mekanisme yang menjelaskan hambatan partisipasi untuk menghasilkan strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, & Baharuddin, I. I. (2016). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientific Pinisi*, 2(1), 1–7.
- Atakari, I., Tang, M. I. P., Yame, J. A. L., Banakari, M., Lapekoli, K., & Bekalani, M. (2023). Observasi Tentang pengelolaan Hutan Mangrove untuk di Jadikan Tempat Wisata Pesona Mangrove Alor kelurahan Mutiara Rt 02,Rw 04 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(4), 266–284.

- <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i4.466>
- Faizal, A., Mutmainna, N., Amran, M. A., Saru, A., Amri, K., & Nessa, M. N. (2023). Application of NDVI Transformation on Sentinel 2A Imagery for mapping mangrove conditions in Makassar City. *Akuatikisle Jurnal Akuakultur Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, 7(1), 59–66. <https://doi.org/10.29239/j.akuatikisle.7.1.59-66>
- Hafrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>
- Kurniawansyah, A., Susiloningtyas, D., & Manessa, M. D. M. (2023). Mangrove ecosystem management in Indonesia: Review, limitation, gap, and knowledge. *Maritime Technology and Research*, 5(3), 262310. <https://doi.org/10.33175/mtr.2023.262310>
- Munawir, A., Nurhasanah, N., Rusdiyanto, E., & Muna, S. U. N. (2022). Kebijakan Pemanfaatan Hutan Mangrove Berkelanjutan dengan Teknik Interpretative Structural Modeling di Taman Nasional Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11693>
- Permata, C. O., Iswandaru, D., Hilmanto, R., & Febryano, I. G. (2021). Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung Terhadap Hutan Mangrove. *Journal of Tropical Marine Science*, 4(1), 40–48.
- <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v4i1.2078>
- Pratiwi, R., Firdaus, M., & Arifudin, A. (2023). Evaluasi Komunikasi Lingkungan Dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kelurahan Teluk Meranti, Pelalawan. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(4), 1605–1615. <https://doi.org/10.31004/jutin.v6i4.22763>
- Rachman, F., Yunita, S., Manik, M. M., Girsang, O. B., Safitri, E., Sabri, T. M., Halizah, N., Yasmin, P. A., & Juliandi, J. (2023). Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Keterlibatan Warga Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tanjung Rejo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 40. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.43782>
- Restuadi, R. N., & Tamami, N. D. B. (2023). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Ekowisata Mangrove di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. *AGRISCIENCE*, 4(1), 38–51. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v4i1.15730>
- Tolangara, A., Eddy, L., & Rasyid, R. (2017). The threat of mangrove population types xylocarpus Moluccensis at North Maluku, Indonesia. *Ecology, Environment and Conservation*, 23, 1281–1285.
- Wardhani, W. N. R., Pratiwi, R., Pambudi, B., Amaniyah, F., & Rohim, F. (2022). Local Uniqueness In The Global Village: Heritage Tourism In Kunir Jepara. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 762–771. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.663>